



KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

JALAN MEDAN MERDEKA BARAT NOMOR 3, JAKARTA PUSAT 10110
TELEPON: 021-3459444 (HUNTING), FAKSIMILE: 021-3843768
SITUS: www.kemenkopmk.go.id

Nomor : 05 / PANSEL-JPT/PEG.02.01 / 03 / 2017
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Pengumuman Jadwal Seleksi Terbuka Pengisian
Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Tahun 2017

Jakarta, 20 Maret 2017

Kepada Yth:

1. Para Menteri Kabinet Kerja;
2. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
3. Para Gubernur; dan
4. Para Walikota/Bupati.

Dalam rangka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Tahun 2017, berdasar amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan memperhatikan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2015 tentang Percepatan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pada Kementerian/Lembaga serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan akan melakukan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya yang dapat diikuti oleh Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sebagaimana terlampir dalam pengumuman dan dapat dilihat serta diunduh di halaman website <http://www.kemenkopmk.go.id>.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Bapak/Ibu dapat menginformasikan pengumuman dimaksud.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Ketua Panitia Seleksi,



Tembusan :

1. Menko PMK (sebagai laporan);
2. Ketua Komisi ASN.



Daftar Lampiran

Surat Nomor: 05 / PANSEL-JPT/PEG.02.01 / 03 / 2017

Tanggal Maret 2017

1. Kemenko Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
2. Kemenko Bidang Perekonomian
3. Kemenko Bidang Kemaritiman
4. Kementerian Sekretariat Negara
5. Kementerian Dalam Negeri
6. Kementerian Luar Negeri
7. Kementerian Pertahanan
8. Kementerian Agama
9. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
10. Kementerian Keuangan
11. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
12. Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
13. Kementerian Kesehatan
14. Kementerian Sosial
15. Kementerian Ketenagakerjaan
16. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
17. Kementerian Perindustrian
18. Kementerian Perdagangan
19. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
20. Kementerian Perhubungan
21. Kementerian Komunikasi dan Informatika
22. Kementerian Pertanian
23. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
24. Kementerian Kelautan dan Perikanan
25. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
26. Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional
27. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Bappenas
28. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
29. Kementerian Badan Usaha Milik Negara
30. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
31. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
32. Kementerian Pariwisata
33. Kementerian Pemuda dan Olahraga
34. Sekretariat Kabinet
35. Badan Pemeriksa Keuangan
36. Arsip Nasional Republik Indonesia
37. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
38. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional

39. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
40. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI
41. Badan Standardisasi Nasional
42. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
43. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan
44. Badan Pengawas Tenaga Nuklir
45. Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka dan Komoditi
46. Badan Pengawasan Obat dan Makanan
47. Badan Pusat Statistik
48. Badan Nasional Penanggulangan Bencana
49. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
50. Badan Informasi Geospasial
51. Badan Koordinasi Penanaman Modal
52. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
53. Badan Kepegawaian Negara
54. Badan Intelijen Negara
55. Lembaga Ketahanan Nasional
56. Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional
57. Badan Narkotika Nasional
58. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
59. Badan SAR Nasional
60. Lembaga Administrasi Negara
61. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah
62. Lembaga Sandi Negara
63. Badan Tenaga Nuklir Nasional
64. Gubernur seluruh Indonesia.
65. Walikota/Bupati seluruh Indonesia.